

## Pelecehan Dan Kekerasan Seksual Di Kalangan Mahasiswa

Shavana Casanova Prabowo<sup>1</sup>, Nazwa Aurida Pasha<sup>2</sup>, D. Irma Novyanti<sup>3</sup>, Ghendist Haerun Niha<sup>4</sup>, Fier Nanda Lestari<sup>5</sup>,  
Dadi Mulyadi Nugraha<sup>6</sup>

Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, Indonesia.

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji fenomena pelecehan dan kekerasan seksual di kalangan mahasiswa dengan menggunakan metode kajian literatur, wawancara, dan angket. Pelecehan seksual merupakan isu serius yang sering terjadi di lingkungan kampus, di mana korban enggan melapor karena stigma sosial dan ketidakpercayaan terhadap mekanisme perlindungan kampus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pelecehan yang paling sering dilaporkan adalah catcalling, diikuti oleh kasus-kasus yang lebih serius seperti penyebaran video asusila dan pemaksaan hubungan seksual. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya regulasi dan penanganan yang efektif untuk mengurangi kasus pelecehan di kampus, termasuk implementasi Peraturan Menteri Kemdikbud Ristek No. 30 Tahun 2021.

**Kata Kunci:** Pelecehan seksual, kekerasan seksual, mahasiswa, catcalling, kampus, regulasi, Peraturan Menteri Kemdikbud Ristek No. 30 Tahun 2021, dukungan psikologis, pencegahan, stigma sosial.

### PENDAHULUAN

Pelecehan dan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi menjadi isu yang semakin mendapat perhatian di berbagai negara, termasuk Indonesia. Mahasiswa, sebagai kelompok yang berada dalam masa transisi menuju kedewasaan, sering kali menghadapi berbagai tantangan, termasuk risiko mengalami atau menyaksikan pelecehan dan kekerasan seksual. Fenomena ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik secara verbal, fisik, maupun digital, dan sering kali terjadi di lingkungan kampus, tempat tinggal, atau dalam interaksi akademik dan sosial.

Data dan berbagai laporan menunjukkan bahwa kasus pelecehan dan kekerasan seksual di kalangan mahasiswa masih banyak yang tidak dilaporkan karena berbagai faktor, seperti ketakutan terhadap stigma, tekanan sosial, serta kurangnya pemahaman mengenai mekanisme pelaporan dan perlindungan hukum. Padahal, dampak dari kejadian ini bisa sangat serius, tidak hanya bagi korban secara individu, tetapi juga bagi iklim akademik dan sosial di lingkungan perguruan tinggi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pelecehan dan kekerasan seksual di kalangan mahasiswa, memahami dampaknya terhadap korban dan lingkungan akademik, serta mengeksplorasi upaya pencegahan dan perlindungan yang dapat dilakukan oleh institusi pendidikan tinggi. Dengan memahami akar permasalahan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif guna menciptakan lingkungan kampus yang aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan seksual.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengkaji fenomena pelecehan dan kekerasan seksual di kalangan mahasiswa dengan menggunakan metode kajian literatur, wawancara, dan angket. Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berkomunikasi langsung antara peneliti dan responden. Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan daftar pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab (Rachmawati, 2007).

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Penyebab Pelecehan Seksual di Kampus

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pelecehan seksual di lingkungan kampus. Pertama, adanya ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku dan korban, baik dalam hubungan akademik maupun sosial. Mahasiswa yang memiliki posisi otoritas, seperti dosen atau senior, seringkali memanfaatkan posisinya untuk menekan pihak yang lebih lemah. Kedua, kurangnya pengetahuan tentang batasan dalam interaksi sosial. Banyak mahasiswa yang belum menyadari batas antara interaksi yang wajar dan yang bisa dikategorikan sebagai pelecehan. Ketiga, norma sosial yang masih mendukung budaya patriarki, di mana perempuan seringkali dianggap sebagai objek seksual, memperparah situasi ini.

Meskipun banyak kasus pelecehan seksual terjadi di kampus, laporan yang masuk seringkali sangat minim. Salah satu alasan utamanya adalah stigma sosial yang melekat pada korban. Banyak mahasiswa yang enggan melaporkan kejadian karena khawatir akan reputasi dan reaksi negatif dari lingkungan sosialnya. Selain itu, adanya ketidakpercayaan terhadap sistem penanganan kasus pelecehan di kampus juga membuat korban merasa tidak mendapatkan keadilan. Kampus seringkali dianggap tidak memiliki mekanisme yang transparan dan tegas dalam menindak pelaku.

#### Dampak Pelecehan Seksual bagi Korban

Korban pelecehan seksual di kampus sering mengalami berbagai dampak negatif, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dampak psikologis seperti trauma, depresi, rasa takut, hingga gangguan kecemasan menjadi masalah utama yang dialami korban. Selain itu, korban juga sering merasa malu, rendah diri, dan kehilangan kepercayaan diri, yang dapat mempengaruhi kinerja akademik mereka (Roni, 2019). Dalam jangka panjang, korban bisa mengalami kesulitan dalam membangun hubungan sosial yang sehat serta gangguan dalam kesehatan mentalnya. Situasi ini juga dapat berdampak buruk pada lingkungan kampus secara keseluruhan, menciptakan atmosfer yang tidak kondusif bagi proses belajar mengajar. Berdasarkan Hasil tinjauan literatur dan hasil wawancara dapat diketahui bahwa:

#### 1) Bentuk Pelecehan yang Sering Dilaporkan

Hasil wawancara menunjukkan bahwa catcalling menjadi bentuk pelecehan seksual yang paling umum dialami oleh mahasiswa, terutama wanita. Catcalling dapat didefinisikan sebagai penggunaan kata-kata yang tidak pantas serta ungkapan verbal dan nonverbal yang terjadi di ruang publik, seperti di jalanan, trotoar, atau tempat pemberhentian bus. Dalam konteks verbal, catcalling biasanya dilakukan melalui siulan atau komentar mengenai penampilan seorang perempuan. Sementara itu, aspek nonverbalnya dapat berupa tatapan atau gerakan fisik yang bertujuan untuk memberikan penilaian terhadap penampilan perempuan.

Fenomena ini tidak mengenal batasan kelas sosial, usia, atau lokasi. Di lingkungan kampus, baik mahasiswa perempuan maupun laki-laki bisa menjadi target catcalling. Walaupun perempuan sering dianggap sebagai korban utama, laki-laki pun tidak terhindar dari pengalaman ini. Meski jumlahnya mungkin lebih sedikit, laki-laki juga bisa mengalami catcalling, meskipun mereka biasanya tidak diobjektifikasi secara seksual oleh orang asing. Penting untuk diingat bahwa mahasiswa, tanpa memandang jenis kelamin, dapat merasakan dampak psikologis yang mendalam akibat catcalling (Nurfadhilah & Alawiyah, 2023).

Meski dianggap sepele, catcalling menimbulkan ketidaknyamanan dan rasa tidak aman bagi korban. Korban catcalling sering kali merasakan ketidaknyamanan dan gangguan saat menghadapi tindakan tersebut. Mereka juga bisa merasa malu dan terhina, terutama ketika perilaku tersebut terjadi di tempat yang ramai. Kecemasan bisa meningkat ketika seseorang merasa bahwa tindakan ini mengancam keselamatan fisik atau emosional mereka, terutama jika catcalling terjadi secara berulang.

Salah satu responden menyatakan bahwa banyak korban yang enggan melaporkan karena menganggap kejadian ini sebagai hal biasa atau kurang penting. Namun, berdasarkan pengamatan tim SPPKS, meskipun catcalling sering terjadi, kasus-kasus yang lebih serius seperti penyebaran video asusila dan pemaksaan hubungan seksual juga banyak dilaporkan. Seorang petugas SPPKS menyatakan bahwa mereka sering menerima laporan terkait penyebaran video tidak senonoh atau pemaksaan untuk melakukan hubungan badan, yang menunjukkan bahwa bentuk pelecehan seksual di kampus tidak hanya sebatas pelecehan verbal.

Berdasarkan hasil survei yang telah dikumpulkan, bentuk-bentuk pelecehan seksual yang paling sering terjadi meliputi penghinaan verbal, pandangan merendahkan, serta ucapan yang berkaitan dengan seksualitas (Shamhah, n.d.). Survei yang dilakukan di kalangan industri juga mengungkapkan bahwa tindakan pelecehan yang umum terjadi melibatkan pemberian julukan atau sapaan seperti “gadis,” “sayang,” dan “cinta,” dengan persentase sebesar 70%.

#### 2) Mekanisme Pelaporan di SPPKS

Kampus telah menyediakan berbagai saluran untuk melaporkan kasus kekerasan seksual, baik melalui media sosial, hotline, maupun langsung di kantor SPPKS yang terletak di gedung kampus. Berdasarkan wawancara, tim SPPKS menyatakan bahwa pelaporan melalui hotline merupakan jalur yang paling sering digunakan oleh korban. Setiap hari, mereka menerima laporan baru, yang kemudian dianalisis dan diverifikasi untuk menentukan apakah kasus tersebut masuk dalam kategori kekerasan seksual. Proses ini dilanjutkan dengan pendampingan korban oleh pihak yang berwenang untuk penanganan lebih lanjut.

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi SPPKS dalam menangani kasus pelecehan seksual adalah ketika pelapor tidak memiliki bukti yang cukup kuat atau tidak berani mengungkapkan identitasnya. Hal ini sering terjadi dalam kasus catcalling, di mana identitas pelaku sulit dilacak. Namun, dalam kasus yang lebih serius seperti penyebaran video asusila, bukti-bukti digital seperti rekaman atau tangkapan layar bisa menjadi alat yang sangat penting untuk mendukung laporan korban. Pendekatan ini menunjukkan bagaimana teknologi memiliki peran penting dalam membantu proses pengaduan dan penanganan kekerasan seksual di kampus.

#### 3) Sikap Terhadap Korban Pelecehan Seksual

Sikap terhadap korban pelecehan seksual, terutama di kalangan mahasiswa, harus berfokus pada empati dan dukungan tanpa menyalahkan korban. Seringkali, korban perempuan disalahkan karena cara berpakaian atau perilaku mereka, padahal pelecehan terjadi akibat ketidakmampuan pelaku mengendalikan diri. Penting untuk menghentikan budaya menyalahkan korban dan memberikan ruang bagi korban untuk berbicara tanpa rasa takut (Harsono, n.d.).

Salah satu poin penting yang diungkapkan dalam wawancara adalah pentingnya tidak menyalahkan korban, terutama wanita yang sudah berusaha menutup aurat dan berpakaian sopan. Narasumber dari tim SPPKS menegaskan bahwa catcalling dan bentuk pelecehan lainnya terjadi karena masalah pada mentalitas pelaku, bukan pada pakaian yang dikenakan oleh korban. Menurut mereka, hal ini menunjukkan bahwa pelecehan seksual adalah refleksi dari ketidakmampuan pelaku dalam mengendalikan gairahnya, bukan karena kesalahan berpakaian korban. Ini merupakan pandangan yang relevan dalam upaya mengubah stigma yang sering kali menyalahkan korban pelecehan seksual.

#### 4) Upaya untuk Membuat Pelaku Jera

Jika pelecehan terjadi di tempat yang ramai, korban dianjurkan untuk secara langsung memperlakukan pelaku agar memberikan efek jera di tempat. Namun, jika pelecehan terjadi di tempat sepi atau pelaku berada dalam kelompok yang besar, korban disarankan untuk menghindari konfrontasi langsung dan mencari tempat aman. Dalam kasus pelecehan melalui media

sosial, penting bagi korban untuk menyimpan barang bukti sebelum melaporkan ke pihak berwenang. Pendekatan ini menunjukkan perlunya strategi yang berbeda dalam menghadapi pelaku, tergantung pada situasi yang dihadapi.

Kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi merupakan isu yang memprihatinkan dan perlu mendapat perhatian serius. Untuk menangani masalah ini, diperlukan adanya regulasi yang jelas agar tindakan pencegahan dan penanganan dapat dilakukan secara efektif. Oleh karena itu, Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbud) telah menerbitkan regulasi penting, yaitu Peraturan Menteri Kemdikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 yang mengatur tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Dalam hal ini, acuan hukum yang dapat digunakan adalah Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. Peraturan ini merupakan langkah baru yang diambil oleh pemerintah untuk mengatur Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi (Paradias & Soponyono, 2022). Salah satu tujuan utama penerbitan peraturan ini adalah untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Selain itu, peraturan ini juga bertujuan untuk memperkuat penanganan kasus kekerasan seksual melalui pendampingan kepada korban, proses pemulihan, penerapan sanksi administratif, serta perlindungan yang lebih baik.

#### 5) Tantangan dalam Penegakan Sanksi

Menurut wawancara, meskipun SPPKS memiliki peran penting dalam menangani kasus kekerasan seksual, penegakan sanksi tidak selalu mudah, terutama jika pelaku memiliki status tertentu, seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS). Proses hukum sering kali berjalan lebih lambat dan kompleks jika melibatkan individu dengan status tersebut. Namun, untuk pelaku yang merupakan mahasiswa, SPPKS cenderung lebih mudah memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di universitas. Sanksi yang diberikan pun bervariasi, mulai dari yang ringan hingga berat, tergantung pada tingkat keseriusan kasus.

#### 6) Dukungan Psikologis untuk Korban

Universitas menyediakan fasilitas berupa pendampingan psikologis bagi mahasiswa yang mengalami pelecehan atau kekerasan seksual. Sebelumnya, SPPKS memiliki safe house di area kampus yang dapat digunakan oleh korban untuk tinggal sementara jika diperlukan. Saat ini, tim SPPKS bekerja sama dengan pihak lain untuk memastikan korban mendapatkan perlindungan dan pendampingan yang memadai, baik secara emosional maupun hukum.

Dukungan psikologis lainnya juga dapat diberikan lewat dukungan sosial, sebagaimana dijelaskan oleh Cohen dan Hoberman (1983), mencakup berbagai sumber daya yang disediakan oleh individu satu sama lain. Efek positif dukungan sosial terhadap kesehatan individu dapat terlihat meskipun mereka tidak sedang mengalami tekanan yang signifikan. Interaksi antara individu dalam lingkungan sosial mereka berperan penting dalam terciptanya dukungan sosial ini. Gottlieb (1983) menambahkan bahwa dukungan sosial dapat berupa informasi atau saran verbal, bantuan konkret, atau tindakan yang diberikan oleh orang-orang terdekat. Bantuan tersebut tidak hanya memberikan dukungan emosional, tetapi juga berdampak pada perilaku penerima dukungan (Evangeline & Herdiana, n.d.).

#### Peran Mahasiswa dalam Mencegah Pelecehan Seksual

Mahasiswa bisa aktif dalam mengikuti kampanye-kampanye yang bertujuan untuk menghentikan kekerasan seksual. Mereka juga bisa membentuk kelompok atau organisasi yang fokus pada advokasi anti-pelecehan, di mana korban bisa mendapatkan dukungan serta informasi yang diperlukan untuk melaporkan kasus (Aurora et al., 2024).

Mahasiswa juga bisa berperan sebagai agen perubahan dengan tidak diam ketika mengetahui ada kasus pelecehan. Solidaritas di antara sesama mahasiswa sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman. Mahasiswa perlu membangun budaya saling menjaga, di mana pelecehan tidak dianggap sebagai masalah pribadi, tetapi masalah bersama yang harus diselesaikan.

## KESIMPULAN

Pelecehan dan kekerasan seksual di kalangan mahasiswa adalah masalah serius yang berdampak luas pada kesejahteraan fisik, mental, dan akademik para korban. Catcalling merupakan bentuk pelecehan seksual yang paling sering terjadi, meskipun bentuk-bentuk yang lebih serius seperti pemaksaan hubungan seksual dan penyebaran video asusila juga banyak dilaporkan. Korban pelecehan seksual di kampus sering mengalami berbagai dampak negatif, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dampak psikologis seperti trauma, depresi, rasa takut, hingga gangguan kecemasan menjadi masalah utama yang dialami korban. Dalam jangka panjang, korban bisa mengalami kesulitan dalam membangun hubungan sosial yang sehat serta gangguan dalam kesehatan mentalnya. Situasi ini juga dapat berdampak buruk pada lingkungan kampus secara keseluruhan, menciptakan atmosfer yang tidak kondusif bagi proses belajar mengajar. Kampus telah menyediakan berbagai saluran untuk melaporkan kasus kekerasan seksual, baik melalui media sosial, hotline, maupun langsung di kantor SPPKS yang terletak di gedung kampus. Namun, korban seringkali enggan melaporkan karena stigma sosial dan kurangnya kepercayaan terhadap mekanisme perlindungan kampus. Mekanisme pelaporan yang ada perlu diperkuat dengan dukungan psikologis yang memadai. Mahasiswa dapat berperan aktif dalam pencegahan pelecehan seksual dengan mendukung korban serta membangun budaya saling menjaga di lingkungan kampus.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aurora, A., Setianingsih, A., Arofatul, I., Saputra, M. A., & Atmanegara, S. (2024). Persepsi mahasiswa terhadap pelecehan catcalling: Kajian fenomenologi. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 29(1).
- Evangeline, T., & Herdiana, I. (n.d.). Pengaruh Dukungan Sosial terhadap Kecemasan Perempuan Korban Kekerasan Seksual. Harsono, M. (n.d.). BERBAGAI BENTUK DAN AKIBAT PELECEHAN SEKSUAL

DI TEMPAT KERJA: SEBUAH KAJIAN AWAL. JURNAL AKUNTANSI, 3(1).

- Hidayat, M. S., Nugraha, A., Wiguna, M. N., & Supriyono, S. (2023). PELECEHAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN MAHASISWA. *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, 7(1), 32–44. <https://doi.org/10.24952/gender.v7i1.7939>
- Ishak, D. (2020). PELECEHAN SEKSUAL DI INSTITUSI PENDIDIKAN: SEBUAH PERSPEKTIF KEBIJAKAN. *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional*, 2(2), 136–144. <https://doi.org/10.54783/jin.v2i2.462>
- Nurfadhilah, N., & Alawiyah, A. (2023). PENGALAMAN PELECEHAN SEKSUAL MAHASISWA DAN PENCEGAHANNYA. *Rausyan Fikr : Jurnal Pemikiran dan Pencerahan*, 19(2). <https://doi.org/10.31000/rf.v19i2.9293>
- Paradias, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 61–72. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72>
- Rachmawati, I. N. (2007). Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 11(1), 35–40. <https://doi.org/10.7454/jki.v11i1.184>
- Roni, N. I. (2019). Persepsi Mahasiswa Terhadap Aktivitas Catcalling di Lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. 3.
- Shamhah, H. (n.d.). PENGETAHUAN, SIKAP, DAN CARA PANDANG MAHASISWA DALAM MENCEGAH KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KAMPUS. 5.